
ANALISIS MANFAAT DAN DAMPAK EKONOMI SOSIAL ATAS PEMANFAATAN BARANG MILIK NEGARA PADA PELABUHAN MULTIPURPOSE WAE KELAMBU, MANGGARAI BARAT, NUSA TENGGARA TIMUR

M. As'ad Firdaus

Direktorat Penilaian, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan Republik Indonesia

Email: asadfr@kemenkeu.go.id

ABSTRAK

Analisis terhadap manfaat dan dampak sosial ekonomi dalam penelitian ini dilakukan terhadap pemanfaatan Barang Milik Negara dengan mekanisme Kerja Sama Pemanfaatan dalam rangka Penyediaan Infrastruktur pada Pelabuhan Wae Kelambu yang berlokasi di Kecamatan Komodo, Kab. Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis manfaat dan dampak ekonomi serta manfaat dan dampak sosial atas pemanfaatan Barang Milik Negara serta memberikan arah prioritas kebijakan pembangunan ekonomi di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Metode yang digunakan dalam analisis penelitian ini adalah metode deskriptif kuantitatif untuk menjelaskan manfaat ekonomi, metode input-output untuk menjelaskan dampak ekonomi dan metode deskriptif kualitatif untuk menganalisis manfaat dan dampak sosial. Hasil penelitian ini menunjukkan manfaat ekonomi atas injeksi investasi yang dilakukan dalam Kerja Sama Pemanfaatan BMN menghasilkan angka pengganda atas investasi sebesar 1,55. Pada analisis dampak ekonomi, hasil analisis menunjukkan *multiplier output* dan *multiplier income* tertinggi di wilayah ini terdapat pada sektor listrik dan gas. Sedangkan sektor dengan angka *multiplier employee* (angka pengganda tenaga kerja) terbesar di wilayah ini terdapat pada sektor industri manufaktur. Manfaat sosial yang dihasilkan atas pemanfaatan BMN ini berupa lancarnya distribusi logistik. Sedangkan dampak sosial yang ditimbulkan adalah meningkatnya lapangan pekerjaan dan terjaganya kestabilan harga barang logistik di wilayah tersebut.

Kata kunci: barang milik negara, investasi, kerja sama pemanfaatan, *multiplier effect*

1. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Secara geografis, Indonesia terkenal sebagai negara kepulauan yang terdiri lebih dari 17 ribu pulau dan tersebar dari sabang sampai ke merauke. Sebagai suatu negara yang terdiri dari ribuan pulau, sarana transportasi laut menjadi hal penting dalam upaya memperlancar konektivitas antar pulau-pulau di seluruh wilayah Indonesia. Pelabuhan yang merupakan sarana transportasi laut adalah fasilitas yang menghubungkan suatu wilayah dengan wilayah lain untuk melakukan aktivitas seperti aktivitas perdagangan, pariwisata atau aktivitas perekonomian.

Pelabuhan memiliki peranan vital dalam membentuk perekonomian suatu negara, dimana salah satunya adalah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Permenhub Nomor 57 Tahun 2020 mendefinisikan pelabuhan adalah tempat yang terdiri dari daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintah dan kegiatan ekonomi yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, berlabuh, naik turun penumpang dan/atau bongkar muat barang yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi. Hal ini menunjukkan bahwa pelabuhan adalah objek vital suatu negara dan merupakan salah

satu infrastruktur penghubung transportasi laut yang dapat berperan untuk peningkatan kegiatan perekonomian suatu wilayah.

Terminal laut atau pelabuhan memiliki peranan penting sebagai titik pertemuan antar moda transportasi dan sebagai salah satu pintu gerbang strategis untuk aktivitas ekonomi. Dengan demikian, pelabuhan menjadi penting dalam pembangunan ekonomi suatu wilayah dalam skala domestik maupun internasional. Pembangunan ekonomi di kawasan pelabuhan dapat menimbulkan dampak (*multiplier effect*) terhadap seluruh sektor ekonomi, termasuk penciptaan kesempatan kerja dan penerimaan pemerintah, baik pusat maupun daerah.

Provinsi NTT memiliki letak geografis yang strategis sehingga sering dilewati oleh transportasi laut domestik maupun internasional. Selain itu, Provinsi NTT juga telah ditetapkan sebagai wilayah ALKI III (Alur Laut Kepulauan Indonesia). Letak geografis tersebut tentunya menjadikan Provinsi NTT sebagai pintu gerbang bagi transportasi laut. Dalam rangka menunjang aktivitas kepelabuhan, pemerintah membangun Pelabuhan *Multipurpose* Wae Kelambu, menggunakan dana APBN. Nilai Wajar BMN berupa tanah dan dermaga tersebut adalah Rp190.624.744.000,-. Barang Milik Negara ini selanjutnya akan dimanfaatkan menggunakan mekanisme Kerja Sama Pemanfaatan (KSP) Barang Milik Negara Dalam Rangka Penyediaan Infrastruktur. Mitra KSP ini adalah PT. Pelindo III. Pelindo III yang bertugas merencanakan investasi untuk menambah fasilitas-fasilitas kegiatan pelabuhan sebesar Rp318.640.679.533,- yang terdiri atas tanah, bangunan kantor, gudang serta peralatan mesin dan kendaraan untuk menunjang aktivitas pelabuhan.

Kunci utama dari pembangunan ekonomi suatu wilayah adalah adanya suatu industri yang dapat memengaruhi perkembangan industri lain. Investasi atas pengoperasian Terminal Wae Kelambu yang cukup besar tersebut seharusnya dapat menumbuhkan *growth pole* (kutub pertumbuhan) baru yang dapat menstimulus perekonomian Provinsi NTT. Oleh karena itu, dengan adanya Kerja Sama Pemanfaatan Infrastruktur ini, penulis menganggap perlu untuk dilakukan penelitian terkait manfaat dan dampak ekonomi sosial

untuk menganalisis manfaat ekonomi, dampak ekonomi serta manfaat dan dampak sosial yang dihasilkan atas pemanfaatan Barang Milik Negara.

Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Berapa besar manfaat ekonomi atas Kerja Sama Pemanfaatan Barang Milik Negara pada Pelabuhan *Multipurpose* Wae Kelambu?;
2. Berapa besar dampak ekonomi atas Kerja Sama Pemanfaatan Barang Milik Negara pada Pelabuhan *Multipurpose* Wae Kelambu?; dan
3. Bagaimana manfaat dan dampak sosial atas Kerja Sama Pemanfaatan Barang Milik Negara pada Pelabuhan *Multipurpose* Wae Kelambu?

Tujuan Penelitian

Peneliti bertujuan untuk melakukan analisis manfaat ekonomi, dampak ekonomi serta manfaat dan dampak sosial atas Kerja Sama Pemanfaatan Barang Milik Negara pada Pelabuhan *Multipurpose* Wae Kelambu. Kajian ini juga bertujuan untuk menganalisis manfaat ekonomi, dampak ekonomi serta manfaat dan dampak sosial atas Kerja Sama Pemanfaatan Barang Milik Negara pada Pelabuhan *Multipurpose* Wae Kelambu. Harapannya, penelitian ini mampu memberikan informasi dan masukan kepada pengambil kebijakan mengenai penentuan prioritas pembangunan ekonomi di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Landasan Teori

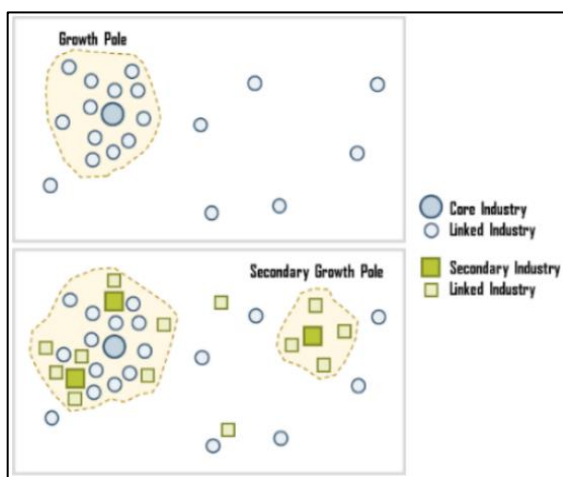
Teori Pengembangan Wilayah

Definsi dari pengembangan wilayah adalah seluruh aktivitas yang dilakukan dalam upaya pemanfaatan potensi-potensi yang ada dalam suatu wilayah, untuk mendapatkan kondisi serta tatanan kehidupan yang lebih baik (Mulyanto, 2018). Berdasarkan hal tersebut, pengembangan wilayah diartikan sebagai peningkatan kemampuan unsur-unsur yang terdapat dalam suatu wilayah. Pengembangan wilayah memiliki tujuan antara lain:

1. Sosial : berupa usaha-usaha pemenuhan kebutuhan dan peningkatan kualitas harapan hidup serta upaya meningkatkan kesejahteraan pada suatu wilayah seperti penurunan angka pengangguran dan meningkatnya lapangan pekerjaan serta penyediaan sarana prasarana kehidupan yang layak.
2. Ekonomi : usaha yang dilakukan untuk mempertahankan kondisi perekonomian dan peningkatan pertumbuhan ekonomi untuk perubahan perekonomian yang lebih baik.

Teori Kutub Pertumbuhan (*Growth Pole*)

Perroux (1950) menjelaskan bahwa *Growth Pole* adalah suatu kumpulan dari industri- industri yang dapat menggerakkan pengembangan perekonomian pada suatu wilayah karena industri-industri tersebut mempunyai kaitan ke depan (*forward linkage*) dan kaitan ke belakang (*backward linkage*). Teori tersebut menunjukkan bahwa terjadinya perkembangan ekonomi pada suatu wilayah disebabkan terdapatnya industri yang mampu merangsang industri lain untuk berkembang. Dengan demikian, akan terjadi hubungan ekonomi yang dinamis untuk memicu berbagai aktivitas ekonomi yang mampu menciptakan lapangan pekerjaan baru dan meningkatkan pendapatan masyarakat.



Gambar 1. Proses Pembentukan *Growth Pole*
Sumber: Perroux 1950

Berdasarkan gambar 1 di atas, dijelaskan bahwa industri atau aktivitas ekonomi berperan sebagai pendorong terwujudnya *growth pole*

(*core industry/ others economic activity*), dimana pada awalnya memicu kemunculan industri/ aktivitas ekonomi lain yang berkaitan dengan kegiatan tersebut yaitu *linked industry*. Keberadaan *linked industry* tersebar di sekitar wilayah *core industry*. Pengumpulan berbagai industri/aktivitas ekonomi ini akan membentuk suatu area sebagai sentra kegiatan industri/ aktivitas ekonomi, dikenal dengan sebutan kawasan industri (*industrial estate*) atau pusat kawasan ekonomi. Ketika suatu kawasan industri/ ekonomi sudah padat, maka akan muncul industri/ ekonomi pendorong di tempat lain yang memicu pertumbuhan kawasan industri/ ekonomi baru.

Pemanfaatan Barang Milik Negara

Barang Milik Negara (BMN) adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Permenkeu Nomor 115 Tahun 2020 Tentang Pemanfaatan BMN menjelaskan bahwa pemanfaatan BMN adalah pendayagunaan Barang Milik Negara yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi dengan tidak mengubah status kepemilikan. Terdapat beberapa mekanisme dalam pemanfaatan BMN antara lain:

1. Pinjam Pakai
2. Sewa
3. Kerja Sama Pemanfaatan
4. BGS/BSG
5. KSPI
6. Kerja Sama Terbatas Pembiayaan Infrastruktur

Kerja Sama Pemanfaatan (KSP) adalah salah satu mekanisme pemanfaatan BMN oleh pihak lain atau disebut pihak mitra, dalam jangka waktu tertentu dalam upaya meningkatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). KSP memiliki jangka waktu pemanfaatan paling lama adalah 30 tahun sejak perjanjian KSP ditandatangani oleh pemerintah dan pihak mitra dan dapat diperpanjang. Apabila KSP dilakukan dalam rangka penyediaan infrastruktur, maka jangka waktu KSP ditetapkan paling lama adalah selama 50 tahun sejak perjanjian KSP ditandatangani dan dapat dilakukan perpanjangan. Kerja Sama Pemanfaatan dilaksanakan dalam rangka:

1. Pengoptimalan daya guna dan hasil guna BMN;
2. Pengoptimalan penerimaan negara seperti Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP); dan
3. *Cost Saving* berupa biaya operasional, biaya pemeliharaan dan biaya perbaikan yang diperlukan terhadap Barang Milik Negara.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian pada penelitian ini adalah dengan pendekatan deskriptif. Adapun lokasi objek penelitian ini adalah Pelabuhan *Multipurpose* Wae Kelambu, Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Peneliti menggunakan data berupa data primer yang peneliti peroleh dari lokasi penelitian serta data sekunder yang peneliti peroleh dari hasil studi kepustakaan maupun publikasi-publikasi yang dikeluarkan oleh berbagai instansi.

Dalam rangka pengumpulan data penelitian, peneliti melakukan:

- a. Observasi dengan melakukan survei lapangan ke lokasi penelitian Pelabuhan *MultiPurpose* Wae Kelambu;
- b. Studi Kepustakaan dari berbagai literatur; dan
- c. Wawancara kepada operator pelabuhan, regulator serta masyarakat sekitar lokasi objek penelitian.

Metode analisis yang digunakan oleh peneliti pada penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif, metode input-output dan metode deskriptif kuantitatif untuk menganalisis manfaat dan dampak sosial ekonomi atas aktivitas pemanfaatan BMN melalui mekanisme Kerja Sama Pemanfaatan (KSP).

Analisis Input-Output (I-O) pada penelitian ini menggunakan tabel input-output Provinsi NTT tahun 2016. Analisis input-output adalah analisis yang mengukur perekonomian suatu wilayah secara komprehensif untuk menjelaskan keterkaitan atau hubungan antar sektor-sektor ekonomi dalam suatu daerah tersebut. Terdapat beberapa keunggulan dari analisis input output (Tarigan, 2010) :

1. Menjelaskan adanya hubungan antar sektor ekonomi dalam suatu wilayah;
2. Menjelaskan hubungan *backward linkages* dan *forward linkages* dari setiap

sektor ekonomi dalam penentuan sektor-sektor basis dalam perekonomian wilayah; dan

3. Sebagai alat untuk perhitungan kebutuhan *labour* dan *capital* dalam perencanaan pembangunan ekonomi wilayah.

Hasil dari analisis input-output yang peneliti lakukan dalam penelitian ini adalah berupa analisis pengganda yang menunjukkan bagaimana peningkatan total dari suatu variabel (Investasi, Output, Pendapatan, dan Tenaga Kerja) akibat perubahan 1 satuan moneter permintaan akhir suatu sektor. Tujuan akhir dari analisis pengganda adalah untuk mengetahui:

- a. *Multiplier effect* atas investasi;
- b. *Multiplier effect* dari output;
- c. *Multiplier effect* dari *income*; dan
- d. *Multiplier effect* dari tenaga kerja.

Multiplier effect atau efek pengganda digunakan untuk menganalisis dampak yang terjadi terhadap pembentukan output, pendapatan rumah tangga, dan lapangan pekerjaan apabila terdapat perubahan pada permintaan akhir dalam kegiatan-kegiatan perekonomian dari suatu wilayah. Nazara (2009) mengatakan bahwa *multiplier effect* output suatu sektor dalam perekonomian wilayah secara matematis didefinisikan sebagai:

$$O_j = \sum_{i=1}^n \alpha_{ij}$$

Keterangan:

O_j : pengganda output pada sektor j
 α_{ij} : elemen matriks kebalikan Leontief $(I-A)^{-1}$

Multiplier effect lapangan pekerjaan secara matematis menurut Nazara (2009) dirumuskan sebagai berikut:

$$E_j = \sum_{i=1}^n W_{n+1,i} \alpha_{ij}$$

Keterangan:

Ej : *multiplier effect* lapangan pekerjaan pada sektor J
Wn+1,i : koefisien tenaga kerja pada sektor j
 α_{ij} : elemen matriks kebalikan Leontief (I-A)-1

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum

Nusa Tenggara Timur adalah suatu wilayah yang dikenal istilah *Flobamorata*, yang memiliki makna kumpulan 5 pulau besar yaitu Flores, Sumba, Timor, Alor dan Lembata. Provinsi ini memiliki luas wilayah berupa daratan seluas 47.931,54 km².



Gambar 2. Peta Provinsi NTT
Sumber: Google Maps 2021

Nusa Tenggara Timur secara astronomis memiliki letak antara 8°-12° Lintang Selatan dan 118°-125° Bujur Timur. Wilayah administrasi di provinsi ini pada tahun 2019 terbagi atas 21 kabupaten dan 1 kota, dengan kabupaten/kota dengan luas wilayah terluas adalah Kabupaten Sumba Timur dengan luas 7.005 km² atau seluas 14,61 persen dari total luas provinsi dan Kabupaten Kupang dengan luas 5.525 km². Wilayah terkecil adalah Kota Kupang dengan luas 180,28 km² atau seluas 0,38 persen dari total luas provinsi. Penduduk yang bekerja menurut lapangan usaha di Provinsi NTT sebagian besar terdapat pada tiga sektor diantaranya sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan dengan kontribusi jumlah tenaga kerja sebesar 48,70 persen, Jasa kemasyarakatan 15,45 persen, dan sektor perdagangan besar dan eceran sebesar 12,25 persen.

B. Deskripsi Objek Analisis

Pelabuhan *Multipurpose* Wae Kelambu berada di Kecamatan Komodo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Objek BMN yang dilakukan KSP merupakan BMN berupa tanah hasil reklamasi seluas 30.000 m² dan dermaga seluas 16.920 m².

Objek KSP berupa tanah saat ini sedang dalam tahapan sertifikasi tanah. Usulan sertifikasi tanah dibuktikan dengan Surat Permohonan Kepala UPP Kelas II Labuan Bajo kepada Kepala KPKNL Kupang No. PL.303/1/8/UPP.LBJ/2021 tanggal 02 September 2021 hal Usulan Pengadaan Sertifikat Tanah Kantor UPP Kelas II Labuan Bajo. Objek KSP terletak di Kelurahan/Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Tanah dan dermaga akan dimanfaatkan sebagai pelabuhan oleh pihak mitra KSP. Pelaksanaan KSP akan dilaksanakan pada tahun 2021 dan akan berakhir pada tahun 2070.



Gambar 3. Foto Terminal Multipurpose Wae Kelambu
Sumber: Survei Lapangan 2021

C. Analisis Manfaat Ekonomi

BMN yang akan dilakukan pemanfaatan melalui mekanisme KSP kepada pihak mitra KSP adalah berupa tanah hasil reklamasi dan dermaga. Berdasarkan hal tersebut, telah dilakukan perhitungan manfaat ekonomi sebagai berikut:

Tabel 1. Manfaat Ekonomi Tahun 2021 – 2022 (dalam rupiah)

No.	Manfaat Ekonomi	2021	2022
1.	Manfaat Penyerapan Tenaga Kerja		
	Gaji Pegawai Terminal Multi Purpose Wae Kelambu	3.530.518.619	3.756.649.101
2.	Manfaat melalui peningkatan pendapatan yang diterima pemerintah daerah		
	Pajak Bumi dan Bangunan	6.199.774	6.199.774
3.	Manfaat melalui peningkatan pendapatan yang diterima Pemerintah pusat		
	Penerimaan Kontribusi Tetap	171.000.000	176.043.804
	Penerimaan Pembagian Keuntungan	-	1.642.959.243
	Pajak Penghasilan	536.263.224	627.104.728
Total Manfaat Ekonomi		4.243.981.617	6.208.956.649

Sumber. Output Hasil Analisis

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, manfaat ekonomi yang dihasilkan atas pemanfaatan BMN Terminal *Multipurpose* Wae Kelambu terdiri atas manfaat penyerapan tenaga kerja, manfaat melalui pendapatan pemerintah daerah dan manfaat melalui pendapatan pemerintah pusat. Manfaat ekonomi dari penyerapan tenaga kerja berasal dari jumlah gaji yang diterima oleh pegawai Terminal *Multipurpose* Wae Kelambu yang berjumlah 25 pegawai. Manfaat ekonomi yang didapatkan oleh pemerintah daerah berupa Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang dibayarkan setiap tahunnya, sedangkan manfaat ekonomi yang didapatkan oleh pemerintah pusat berupa penerimaan kontribusi tetap, pembagian keuntungan dan pajak penghasilan yang dibayarkan oleh pengelola pelabuhan.

Manfaat ekonomi yang diterima atas pemanfaatan BMN dengan mekanisme Kerja Sama Pemanfaatan Infrastruktur (KSPI) pada tahun 2021 adalah sebesar Rp4.243.981.617,- dan sebesar Rp6.208.956.649 pada tahun 2022. Total manfaat ekonomi yang diterima selama 50 tahun adalah sebesar Rp394.835.283.057,- dengan mempertimbangkan nilai waktu dari uang. *Discount rate* yang digunakan adalah *social discount rate* sebesar 9 persen.

D. Analisis Dampak Ekonomi

Analisis Input-Output digunakan untuk mengetahui peranan sektor tertentu dalam perekonomian dan memberikan gambaran secara agregat mengenai keterkaitan antar sektor di dalam perekonomian. Pada analisis dampak ekonomi ini dilakukan perhitungan *multiplier effect* atas rencana pengembangan investasi yang dilakukan pihak mitra KSP di atas BMN yang akan dilakukan pemanfaatan. Rencana investasi mitra KSP adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Rincian Rencana Investasi Mitra KSP

No	Keterangan	Rencana Investasi
1.	Biaya Modal	318.641.000.000,-
2.	Biaya Operasional	78.978.000.000,-
Total		397.619.000.000,-

Sumber: Proposal Mitra KSP

Berdasarkan rencana investasi mitra KSP tersebut, dilakukan injeksi pada sektor konstruksi dan *electricity*. Berdasarkan injeksi terhadap sektor tersebut, dengan rencana investasi sebesar Rp397.619.000.000,-, besarnya perubahan nilai menjadi Rp617.847.000.000,- dengan angka pengganda (*multiplier effect*) sebesar 1,55. Angka pengganda ini menunjukkan bahwa setiap Rp1,- nilai investasi berupa pembangunan sebuah proyek akan menghasilkan efek pengganda terhadap perekonomian sebesar 1,55 kali. Sektor terbesar yang memberikan dampak ekonomi atas injeksi investasi yang diberikan yaitu:

Tabel 3. Sektor dengan Dampak Ekonomi Terbesar (dalam rupiah)

No.	Sektor Perekonomian	Dampak Ekonomi
1.	Construction	299.003.000.000,-
2.	Electricity and Gas	208.871.000.000,-
3.	Wholesale and Retail Trade	26.833.000.000,-
4.	Transportation and Storage	19.628.000.000,-
5.	Financial and Insurance Activities	13.208.000.000,-

Sumber. Hasil Analisis

Tabel 3 di atas menunjukkan bahwa sektor konstruksi dan sektor listrik dan gas memberikan dampak terbesar atas injeksi investasi KSP yang dilakukan. Sektor konstruksi memberikan dampak terhadap perekonomian sebesar Rp299.003.000.000,- dan sektor listrik dan gas memberikan dampak sebesar Rp208.871.000.000,-. Sektor lainnya yang memberikan dampak terbesar atas injeksi investasi yang diberikan adalah sektor perdagangan besar, sektor transportasi dan pergudangan, serta sektor aktivitas keuangan dan asuransi.

Meningkatnya permintaan akhir suatu sektor ekonomi tidak hanya meningkatkan output produksi sektor ekonomi tersebut, namun juga akan meningkatkan output sektor lain dalam suatu perekonomian. Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan sebagaimana ditunjukkan oleh tabel 3 di bawah, sektor listrik dan gas menjadi sektor dengan *multiplier output* tertinggi yaitu sebesar 2,1321 dan sektor industri manufaktur menjadi sektor tertinggi kedua dengan *multiplier output* sebesar 1,6182. Hal ini menunjukkan bahwa, setiap kenaikan permintaan output sektor listrik dan gas dan sektor industri manufaktur masing-masing sebesar Rp1.000.000,- maka memiliki dampak pada peningkatan perekonomian secara agregat sebesar Rp2.132.100,- dan Rp1.618.200,-. Sektor Finansial dan Asuransi menjadi sektor yang memiliki *multiplier output* terendah yaitu sebesar 1,139.

Tabel 4. Sektor Dengan Angka Pengganda Output Tertinggi

No	Uraian Sektor	Dampak Awal	Output Multiplier
1	Electricity and Gas	1,0000	2,1321
2	Manufacturing	1,0000	1,6182
3	Accommodation and Food Service Activities	1,0000	1,5154

Sumber: Hasil Analisis

Peningkatan permintaan akhir suatu sektor juga dapat memberikan dampak terhadap pendapatan rumah tangga secara keseluruhan. Di Provinsi Nusa Tenggara Timur, sektor listrik dan gas serta sektor industri manufaktur merupakan sektor dengan *multiplier* tertinggi. Sebagaimana ditunjukkan pada tabel 5 di bawah, sektor listrik dan gas memiliki *income*

multiplier sebesar 3,8918 yang menunjukkan bahwa setiap terdapat peningkatan pendapatan sektor listrik dan gas sebesar Rp1.000.000,- maka akan memiliki dampak terhadap peningkatan pendapatan pada seluruh sektor sebesar Rp3.891.800,-. Sedangkan sektor yang memiliki *income multiplier* terendah adalah sektor *real estate* dengan *income multiplier* sebesar 1,096.

Tabel 5. Sektor Dengan Angka Pengganda Pendapatan Tertinggi

No	Uraian Sektor	Income Multiplier	Type I Income Multiplier
1	Electricity and Gas	0,2645	3,8918
2	Manufacturing	0,7222	2,3510
3	Accommodation and Food Service Activities	0,7560	1,7491

Sumber: Hasil Analisis

Multiplier Effect tenaga kerja adalah dampak total dari terjadinya perubahan lapangan pekerjaan dalam suatu perekonomian karena terjadinya peningkatan permintaan akhir pada sektor tertentu. Tabel 6 di bawah ini menunjukkan angka pengganda tenaga kerja pada Provinsi NTT. Sektor manufaktur adalah sektor ekonomi dengan angka pengganda tenaga kerja tertinggi yaitu sebesar 12,005. Hal ini menunjukkan bahwa setiap terdapat peningkatan jumlah tenaga kerja disektor industri manufaktur sebesar 1 tenaga kerja maka akan meningkatkan jumlah tenaga kerja diseluruh sektor sebanyak 12 tenaga kerja. Sektor tertinggi selanjutnya adalah sektor keuangan dan asuransi dan sektor listrik dan gas.

Tabel 6. Sektor Ekonomi dengan Angka Pengganda Tenaga Kerja Tertinggi

No	Uraian Sektor	Employee Multiplier	Type I Employee Multiplier
1	Manufacturing	0,0249	12,005
2	Financial and Insurance Activities	0,0025	2,9353
3	Electricity and Gas	0,0090	2,9338

Sumber: Hasil Analisis

E. Analisis Manfaat dan Dampak Sosial

Terminal Wae Kelambu sebagai pelabuhan terbesar di Labuan Bajo akan

menjadi pusat kegiatan logistik yang sebelumnya berpusat di Pelabuhan Labuan Bajo. Adanya Terminal Wae Kelambu ini memberikan manfaat dan dampak sosial terhadap masyarakat yang ada di wilayah tersebut. Manfaat sosial atas pemanfaatan BMN tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Peningkatan utilitas pengangkutan peti kemas dan kargo yang membuat efisiensi pengangkutan barang sehingga dapat menurunkan biaya dan waktu dalam pengangkutan barang logistik;
- b. Membuat distribusi logistik di Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur menjadi lebih lancar, karena tidak bersamaan dengan pelayanan kapal penumpang; dan
- c. Mendukung peningkatan pariwisata di Labuan Bajo karena dengan adanya Terminal Wae Kelambu, maka aktivitas kapal penumpang akan beroperasi penuh pada pelabuhan Labuan Bajo.

Dampak sosial atas pemanfaatan BMN tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan aktivitas perekonomian di sekitar wilayah Terminal Wae Kelambu dan di Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur;
- b. Penurunan angka tingkat pengangguran wilayah dengan adanya peningkatan lapangan pekerjaan dan aktivitas perekonomian; dan
- c. Menstabilkan harga-harga logistik dengan adanya efisiensi dan efektivitas arus barang logistik di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

4. KESIMPULAN

Manfaat ekonomi yang dihasilkan atas pemanfaatan BMN Terminal *Multipurpose* Wae Kelambu terdiri atas manfaat penyerapan tenaga kerja, manfaat melalui pendapatan pemerintah daerah berupa pajak daerah yang dibayarkan dan manfaat melalui pendapatan pemerintah pusat berupa kontribusi tetap, pembagian keuntungan dan pajak penghasilan. Manfaat ekonomi yang diterima pada tahun 2021 adalah sebesar Rp4.243.981.617,- dan sebesar Rp6.208.956.649,- pada tahun 2022. Total manfaat ekonomi yang diterima adalah sebesar Rp394.835.283.057,- selama masa KSP yaitu 50 tahun. Selain itu, pemerintah juga akan mendapatkan manfaat berupa tanah, bangunan,

serta peralatan dan mesin yang diinvestasikan oleh pihak mitra akan menjadi milik pemerintah pada akhir masa KSP.

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan, angka pengganda atas investasi adalah sebesar 1,55. Hal ini menunjukkan dampak ekonomi yang diberikan atas injeksi rencana investasi sebesar Rp397.619.000.000,- mengalami besaran perubahan nilai menjadi Rp617.847.000.000,-. Sektor terbesar yang terdampak atas injeksi investasi tersebut adalah sektor konstruksi, sektor listrik dan gas serta sektor perdagangan besar.

Berdasarkan hasil analisis, *multiplier output* dan *multiplier income* tertinggi di Provinsi Nusa Tenggara Timur terdapat pada sektor listrik dan gas. Sedangkan sektor dengan angka *multiplier employee* (angka pengganda tenaga kerja) terbesar di Provinsi Nusa Tenggara Timur terdapat pada sektor industri manufaktur.

Pemanfaatan BMN dengan mekanisme KSP ini memberikan dampak dan manfaat sosial yang sangat besar terhadap masyarakat. Manfaat sosial atas pemanfaatan BMN ini adalah terdapatnya peningkatan efisiensi dan dampak sosial yang diberikan antara lain lancarnya distribusi logistik, peningkatan pariwisata, kestabilan harga logistik serta peningkatan lapangan pekerjaan yang dapat menurunkan angka pengangguran.

Saran

Berdasarkan hasil analisis, jika ingin meningkatkan total output perekonomian, maka disarankan prioritas kebijakan pembangunan ekonomi di Provinsi Nusa Tenggara Timur melakukan prioritas investasi yang ditujukan pada sektor yang memiliki *multiplier effect* output tertinggi yaitu sektor listrik dan gas serta sektor industri manufaktur. Arah kebijakan pembangunan ekonomi jika untuk meningkatkan pendapatan total dalam perekonomian, maka prioritas investasi adalah pada sektor yang memiliki *income multiplier* tertinggi yaitu sektor listrik dan gas serta sektor industri manufaktur. Dan jika arah kebijakan pembangunan ekonomi diprioritaskan untuk meningkatkan jumlah penyerapan tenaga kerja, maka prioritas investasi ditujukan pada sektor industri manufaktur serta sektor keuangan dan asuransi yang berdasarkan hasil analisis memberikan efek pengganda tertinggi.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur. (2020). Ringkasan Data Tenaga Kerja Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2020. BPS : Jakarta
- Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur. (2021). Tabel Input Output Provinsi Nusa Tenggara Timur Transaksi Domestik Atas Harga Produsen (17 Lapangan Usaha) Tahun 2016. BPS : Jakarta
- Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur. (2021). Statistik Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021. BPS : Jakarta.
- Mulyanto. (2018). Prinsip-Prinsip Pengembangan Wilayah. Suluh Media : Yogyakarta
- Nazara, Suhasil. (2009). Analisis Input Output Edisi Kedua. Jakarta: LPFE Universitas Indonesia.
- Peraturan Menteri Perhubungan No. 51 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut.
- Peraturan Menteri Keuangan No. 115 Tahun 2020 Tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara.
- Perroux, F. (1950). *Economic Space, Theory and Application. Quarterly Journal of Economics*, 89-104.
- Tarigan, Robinson. (2010) *Ekonomi Regional : Teori dan Aplikasi*. Bumi Aksara : Jakarta